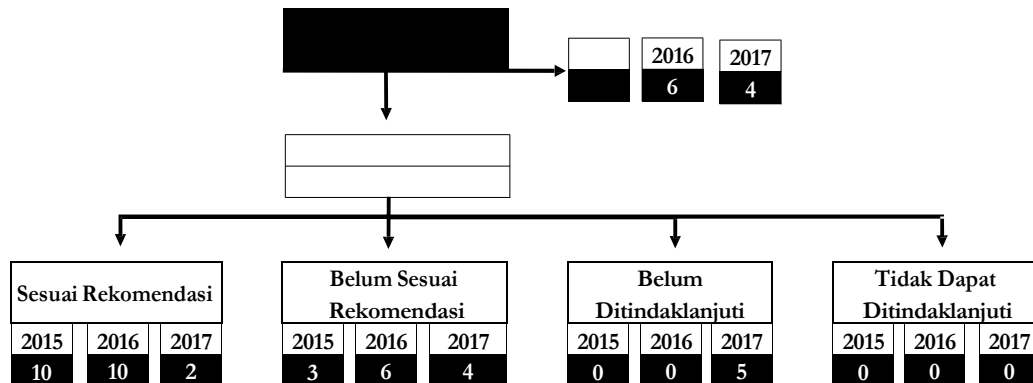


**TELAAHAN BAKN DPR RI TERKAIT REKOMENDASI BPK
 ATAS HASIL PEMERIKSAAN BPK RI PADA
 KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA (KPPU)**

Berikut ini adalah gambar yang menjelaskan tentang jumlah temuan dan rekomendasi, serta status pemantauan tindak lanjut atas rekomendasi BPK untuk Tahun Anggaran 2015 sampai dengan Tahun Anggaran 2017 Komisi Pengawas Persaingan Usaha:



Berdasarkan gambar di atas, BAKN membatasi penelaahan pada beberapa temuan dan permasalahan yang perlu mendapat perhatian, yaitu:

Laporan Hasil Pemeriksaan pada penilaian Kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-undangan KPPU Tahun Anggaran 2017, BPK mengungkapkan adanya temuan masih dalam proses tindak lanjut mengenai pemborosan atas 36 kegiatan KPPU yang menggunakan jasa EO sebesar Rp264.020.212, kelebihan pembayaran sebesar Rp103.212.000 dan pajak atas penghasilan belum dipungut sebesar Rp23.865.499. Untuk itu, BPK merekomendasikan kepada Kepala KPPU untuk menginstruksikan PPK, PPSPM dan Bendahara Pengeluaran melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya sesuai ketentuan berlaku dalam melakukan verifikasi atas bukti pertanggungjawaban belanja serta menarik kelebihan pembayaran senilai Rp103.212.000 dan memerintahkan EO untuk menyetorkan PPh Pasal 21 senilai Rp23.865.499 ke kas negara.